

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGADAAN AIR MINUM DI JALUR PANTURA

People Participation in Water Supplying in North Coastal Regions (A Case Study in Sayung Subdistrict, Demak Regency)

Nurul Akhmad

*Dosen Jurusan Hukum UNNES dan Peneliti Pada
Pusat Kajian Hukum Dan Kebijakan Transformatif Jawa Tengah*

ABSTRACT

The background of the research is the researcher curiosity to know people participation in some villages in Sayung Sub-district, which border on South coast in water supply and management. Although there is no water supply from Sayung Sub-district government, there is no social movement in the area.

The research focuses on the background, problems, and efforts in people participation application to supply water in villages in Sayung Sub-district i.e. Bedono, Timbulsloko, Surodadi, and Sriwulan.

The results of the research are, first, the background of people participation in supplying water is the need of water as the primary need for life. Second, people participation in water supply and management consists of physic and non-physic. Non-physic includes ideas while. physics includes money collecting to buy and maintain water pump and working together to install water pipes. Third, the effort to encourage people participation in water supply is by empowering people participation by people's figures, religion figures and education party.

The conclusion of the research is that although people participation in Bedono, Timbulsloko, Surodadi, and Sriwulan - villages in Sayung Sub-district in water supply and management is good, but it is necessary to apply better technology to change the use of artesian wells. From the conclusion, the researcher recommends first, the government needs to do preliminary and quality test on the water from artesian wells. Second, before the government is able to supply water to those villages, the government needs to give subsidizing by reducing the price of electricity bill, especially which is used for water pump from artesian wells which are used for public.

Keywords: *people participation, water management, Sayung sub-district*

PENDAHULUAN

Permasalahan masyarakat pedesaan di Pantai Utara Jawa, seperti Kabupaten Demak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa penyediaan air minum sangat berat. Berdasarkan hasil survey awal di wilayah

Kecamatan Sayung yang berbatasan dengan Kota Semarang, ditemukan fenomena alam berupa “rob” atau air pasang naik yang sangat merugikan penduduk. Fenomena “rob” ini tidak hanya menggenangi rumah-rumah penduduk di pinggiran pantai, tetapi telah

membuat air tanah menjadi asin. Kadar garam laut yang meresap ke air tanah telah menyulitkan penduduk, sebab sumur-sumur tradisional mereka yang tidak terlalu dalam mengeluarkan air yang mengandung garam.

Hingga saat ini belum ada solusi bagi permasalahan tersebut. Warga desa-desa di Kecamatan Sayung saat ini menggantungkan ketersediaan air minum dari orang kaya (elit) desa yang membangun sumur artesis. Mereka membeli air sumur artesis ini dan membuat bak-bak tandon. Keberadaan sumur artesis tertentu ini cukup membantu ketersediaan air minum, meskipun harganya masih tergolong mahal. Rata-rata untuk memenuhi kebutuhan seminggu warga harus rela mengeluarkan dana sampai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam survey awal ditemukan fenomena menarik di Kecamatan Sayung. Warga desa ini sejak sepuluh tahun yang lalu telah menikmati air minum lebih murah dan leluasa. Mereka saat itu bersama-sama membangun sumur artesis dengan dana swadaya. Setelah berhasil membangun sumur artesis tersebut, mereka membuat mekanisme penyaluran, pembiayaan operasional bulanan, perawatan, dan layanan pengaduan sendiri. Berdasarkan informasi sementara, bahwa setiap warga saat ini hanya mengeluarkan iuran Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan air minum sebulan. Dengan pengeluaran yang relatif kecil mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara lebih leluasa daripada yang dialami warga desa lainnya.

Berdasarkan informasi awal tersebut peneliti bermaksud menggali data lapangan lebih mendalam lagi. Peneliti akan mencoba menelusuri proses munculnya prakarsa warga, proses pengelolaan layanan, dan mekanisme

partisipasi masyarakat disalurkan dalam pengelolaan layanan air minum di Kecamatan Sayung. Untuk itulah diusulkan proyek penelitian ini dalam rangka menggali kearifan dan potensi lokal untuk memantapkan pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesungguhnya adalah pengembangan semangat demokrasi, peningkatan peran sert dan pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian landasan filosofis yang melatarbelakangi lahirnya UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sedangkan menurut Kjellberg (1995:40-43) dalam teorinya *Local self-government*, otonomi lokal lahir sebagai tanggapan terhadap ekspansi-intervensi pemerintah dalam masyarakat. Dasar-dasar ideologis yang menjadi penyebab utama proses ini adalah penekanan terhadap pelaksanaan otonomi, partisipasi dan efisiensi dalam masyarakat lokal. Dalam aspek partisipasi dimaksudkan agar warga masyarakat menjadi terbiasa dengan isu-isu publik, di mana mereka menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan untuk menentukan prioritas-prioritas program pembangunan dan untuk mencapai kompromi di antara kepentingan yang berbeda.

Dalam hubungannya dengan proses pembangunan dan layanan umum, tujuan pemberian otonomi kepada masyarakat desa adalah agar kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui apa yang oleh Hilhorst, seperti yang diadopsi oleh Fernandez (1992:28), sebagai adanya kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan yang memenuhi tuntutan

kebutuhan masyarakat. Artinya, bahwa dalam proses pembangunan dan layanan publik diperlukan adanya desentralisasi (otonomi) di tingkat desa.

BAHAN DAN METODA

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Dari pendekatan penelitian seperti ini diharapkan akan mampu digambarkan berbagai makna yang digali dari kearifan masyarakat, karena dapat terungkapnya berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang penuh nuansa (Miles dan Huberman, 1984; Sutopo, 1989).

Menurut Yin (1997), studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, di mana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan di mana multi-sumber bukti dimanfaatkan. Melalui studi kasus ini, maka penelaahan terhadap suatu kelompok masyarakat desa penelitian akan dilakukan secara mendalam, mendetail dan menyeluruh, sehingga akan diperoleh pernyataan-pernyataan yang bersifat eksplanasi.

Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menempatkan sebagai subyek peneliti tetapi lebih dari itu, peneliti juga terlibat secara langsung dalam proses penguatan (*empowerment*) karena adanya tuntutan di lapangan. Dengan seperti itu, peneliti akan lebih mudah untuk memahami segala hal yang terkait dengan penerapan, kendala serta upaya-upaya dalam penerapan partisipasi masyarakat pengadaan dan pengelolaan air minum di masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan hal-hal mengenai *pertama*, penerapan partisipatif dalam pengadaan dan pengelolaan air minum oleh warga di desa-desa di Kecamatan

Sayung Kabupaten Demak yang berbatasan dengan pantai. *Kedua*, kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan partisipatif dalam pengadaan dan pengelolaan air minum oleh warga di desa-desa di Kecamatan Sayung yang berdekatan dengan pantai. Ketiga, usaha-usaha yang dilakukan untuk keberhasilan penerapan partisipatif pengadaan dan pengelolaan air minum oleh warga di desa-desa di Kecamatan Sayung yang berbatasan dengan pantai.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi kajian pembangunan desa, khususnya kajian terhadap peranserta dan partisipasi masyarakat desa proses dalam rangka mewujudkan otonomi desa yang semakin mantap di masa depan, yaitu melalui pengelolaan air minum bagi warga setempat. *Secara praktis*, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan masukan bagi perencana dan pengelola program-program pembangunan pedesaan, terutama bagi aparatur pemerintahan desa dalam hal memecahkan berbagai kendala yang dihadapi dalam mengembangkan partisipasi warga masyarakat desa dalam pelayanan publik/masyarakat dan memantapkan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan layanan publik oleh masyarakat sendiri, serta memacu efektivitas dan efisiensi penerapan partisipasi masyarakat dalam penerapan partisipasi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Air Minum/Bersih

Satu hal yang sangat menarik dan perlu diperhatikan terhadap kecamatan Sayung adalah berkaitan dengan air minum. Meskipun di kecamatan ini banyak desa yang wilayahnya berbatasan

dengan laut, tetapi berdasarkan penelitian diketahui bahwa, masyarakat di desa yang berbatasan dengan laut belum pernah ada gejolak terkait dengan kebutuhan air minum atau air minum. Tentunya kondisi ini berbeda dengan desa-desa lain di Kecamatan lain di Kabupaten Demak, dimana pada waktu musim kemarau panjang masyarakat desa yang berbatasan dengan laut pada umumnya mengalami kekuarangan air minum, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air minum harus didatangkan dari kabupaten atau daerah lain.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, adanya peran dan partisipasi aktif dari masyarakat di desa Bedono, Desa Sriwulan, Desa Timbul Sloko, dan Desa Surodadi dalam hal pengadaan dan pengelolaan air minum atau air minum, yang secara lengkap akan peneliti paparkan di bawah ini.

Desa Bedono, Desa Sriwulan, Desa Timbul Sloko, dan Desa Surodadi mengalami kendala serius dalam pengadaan air minum karena air bawah tanah di desa-desa tersebut terkontaminasi dengan garam dari air laut, sebab jarak dari laut tidak lebih dari 1 kilometer. Pada waktu yang sama, pemerintah Kecamatan Sayung dan Kabupaten Demak belum dapat menyediakan sarana air minum untuk seluruh masyarakat di semua desa tersebut. Bahkan sampai sekarang, pemerintah kecamatan Sayung dan kabupaten Demak juga belum dapat memberikan sarana air minum untuk keempat desa tersebut.

Belum tersedianya sarana air minum di empat desa tersebut karena disebabkan karena lokasi yang sangat jauh dari perkotaan, sehingga sangat tidak mungkin PAM Kabupaten Demak untuk memasang pipa instalasi air minum di keempat desa tersebut.

Sebelum ada sumur artesis, pemenuhan air minum/bersih di keempat desa tersebut dipenuhi dari air hujan, meskipun masyarakat mengetahui bahwa air hujan tersebut tidak layak minum karena kebersihan airnya tidak terjamin.

Kondisi yang demikian itu, disadari betul oleh masyarakat di keempat desa tersebut, sehingga tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan air minum, kecuali harus membuat sumur artesis, yang biayanya dipikul bersama secara bergotong royong oleh masyarakat sendiri.

Kendala Yang Dihadapi Dan Solusi Yang Diambil

Beberapa kendala yang ditemukan peneliti, baik berdasarkan pengamatan maupun wawancara yang dilakukan, dapat dideskripsikan berikut ini.

a. Kenaikan Tarif dan Listrik Padam.

Kenaikan tarif listrik menjadi momok bagi masyarakat di empat desa lokasi penelitian. Kenaikan TDL ini mau tidak mau telah memberikan beban keuangan yang semakin berat bagi masyarakat karena akan berpengaruh pada penambahan iuran listrik untuk operasional sumur artesis. Bagi pengurus pengelola air minum kenaikan TDL merupakan kendala untuk kelancaran penarikan iuran warga.

Di desa Sriwulan, sejak digulirkan kebijakan tarif dasar listrik (TDL) oleh pemerintah, yaitu sejak tahun 2000 sampai saat ini, badan pengelola air minum di Kecamatan Sayung telah menaikkan iuran air sebanyak 3 kali. Harga air pada tahun 2000 sebesar Rp. 4.000,00. Sejak Bulan April tahun 2002 tarif air naik menjadi Rp. 6.000,00. Januari 2004 tarif air naik lagi hingga saat ini menjadi Rp. 9.000,00. Dengan biaya rekening listrik yang mencapai 9 juta rupiah saat ini, maka kenaikan iuran pun tak dapat dihindarkan lagi.

Selain kenaikan tarif daya listrik (TDL) ancaman listrik padam juga menjadi momok bagi masyarakat desa Bedono, Timbulsloko, Surodadi, dan Sriwulan. Pesolan ini sampai sekarang belum dapat dipecahkan atau dicarikan solusinya. Selama ini pemerintah Kabupaten Demak atau Kecamatan Sayung belum pernah ikut secara langsung mengatasi persoalan pengadaan air minum oleh masyarakat, meskipun sebenarnya seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap pengadaan air minum/bersih yang merupakan kebutuhan pokok hidup.

b. Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Kenaikan harga BBM menjadi momok bagi masyarakat di Desa Bedono, Timbulsloko, Surodadi, dan Sriwulan karena secara otomatis naiknya harga BBM akan menjadikan iuran bulanan air akan naik.

Secara umum, kondisi ekonomi yang buruk tentu akan berakibat bagi kemampuan warga untuk membayar iuran air yang akan semakin mahal. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka beban pengurus akan semakin berat.

Yang diharapkan oleh masyarakat untuk mengatasi persoalan air minum yaitu adanya perhatian pemerintah, baik pemerintah kecamatan maupun kabupaten, untuk memberi bantuan mesin disel untuk menggantikan listrik pada saat padam. Jika ini dapat dilakukan, maka dapat mengurangi beban masyarakat di semua desa yang berbatasan dengan laut atau desa-desa yang air minumnya dipenuhi dari air sumur artesis.

Usaha-Usaha Yang Dilakukan Untuk Keberhasilan Penerapan Partisipasi Masyarakat

Usaha-usaha yang dilakukan untuk keberhasilan penerapan partisipasi

masyarakat di empat desa di lokasi penelitian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penguatan/pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (*empowerment*)

Secara tidak langsung penguatan peran serta masyarakat di lokasi penelitian berlangsung secara terus menerus yang dilakukan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pendidik di empat desa Bedono, Timbulsloko, Surodadi, dan Sriwulan. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik/guru di empat desa tersebut dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan betapa pentingnya peran serta atau partisipasi masyarakat untuk kemajuan dan pembangunan di masyarakat. Berdasarkan analisisnya terhadap kasus-kasus di negara berkembang, Carlson (1985), menengahkan bahwa sesungguhnya kemampuan rakyat untuk menolong diri sendiri dapat diperbesar dan ditingkatkan hanya dengan memberi bimbingan dan pengarahan seperlunya. Dengan kata lain, bahwa tujuan-tujuan dari program pemerintah yang ditetapkan haruslah yang paling cocok bagi masyarakat itu.

Penguatan (*empowerment*) oleh tokoh agama kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan keagamaan, misalnya dalam pengajian rutin, tablig akbar, dan pertemuan rutin pengurus mushola atau masjid. Penguatan oleh tokoh masyarakat kepada masyarakat dilakukan melalui oleh Badan Pembangunan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat lainnya dalam berbagai forum pertemuan warga yang dilakukan secara rutin setiap bulan di Balai Desa dan tempat-tempat lainnya. Sedangkan penguatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh para pendidik/guru dilakukan dalam pertemuan-pertemuan antara guru dengan wali murid dalam berbagai kesempatan.

Oleh Korten dan Sjahrir (1988:318) dikatakan paradigma *empowerment* sangat sesuai dengan paradigma pembangunan desa yang dinamakan dengan "Pendekatan Pembangunan Berwawasan Kerakyatan" (*People centered development*). Model ini menekankan perhatian pada keterlibatan masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang responsif terhadap ide dan aspirasi masyarakat di pedesaan. Tujuan akhirnya adalah mencapai transformasi masyarakat pedesaan berdasarkan nilai-nilai pembangunan yang berwawasan kerakyatan. Demikian juga Hagul (1985:141) mengemukakan, bahwa paradigma pembangunan dengan cara penguatan (*empowerment*) masyarakat disebut dengan "Pembangunan Masyarakat dari Dalam" (*Development from within*).

b. Menjaring Aspirasi Masyarakat

Stabilisasi pengadaan dan pengelolaan air minum di lokasi penelitian lebih disebabkan karena setiap kebijakan yang diambil oleh pengelola selalu dibangun dari partisipasi masyarakat atau dengan pola *interaktif*, *desentralized*, dan *with people (bottom up)*. Dengan pola seperti itu, setiap kebijakan yang diambil oleh pengurus pengelola air minum akan selalu mendapat dukungan dari masyarakat karena kebijakan tersebut berakar dari inisiatif dan partisipasi masyarakat. Pola inilah yang disebut dengan kebijakan

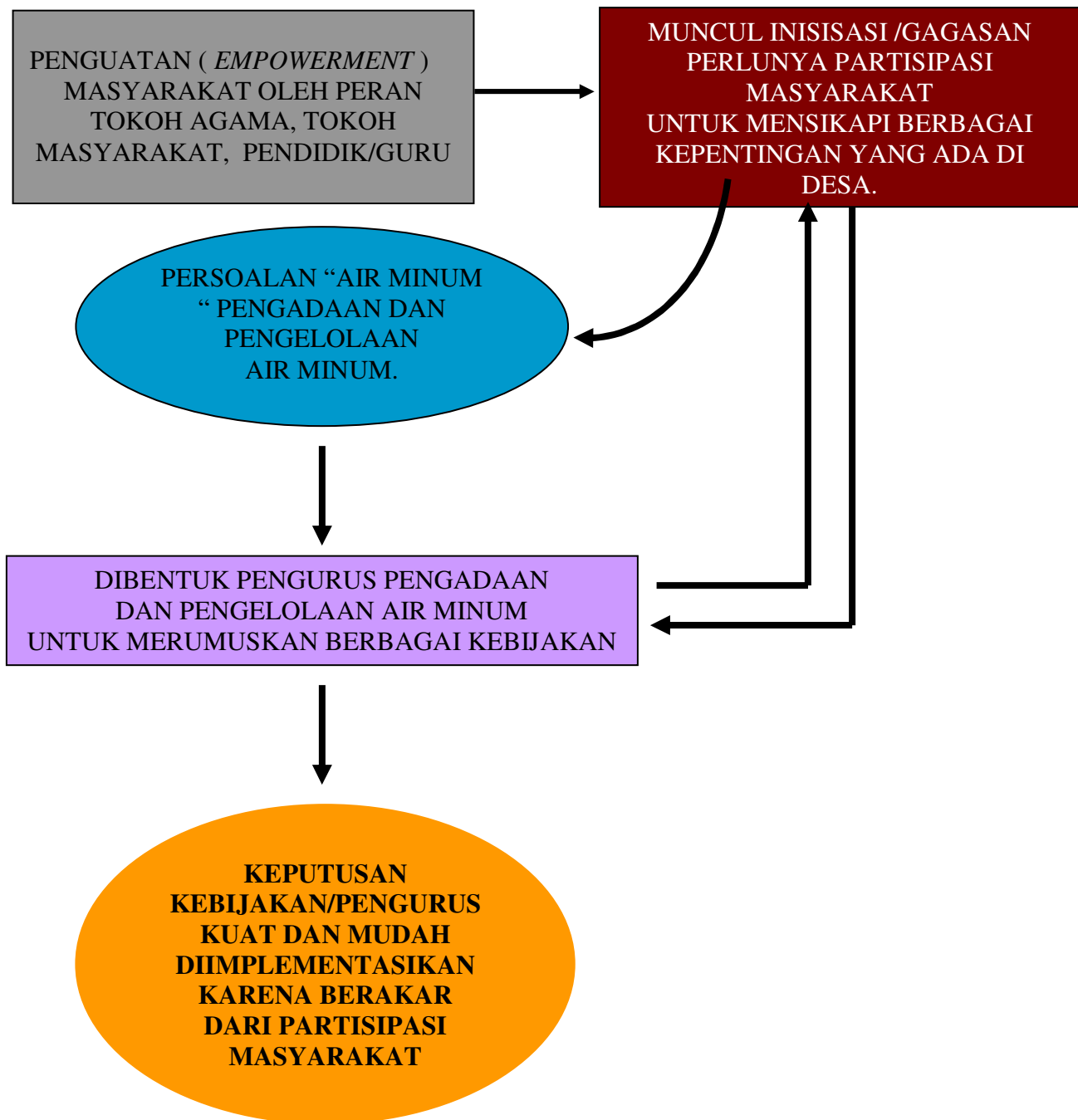
publik yang berperspektif partisipasi masyarakat.

Penerapan pola kebijakan yang berperspektif partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air minum akan menjadikan (1) adanya hubungan yang erat antara masyarakat dan pengurus pengelola air bersih terjadi secara terus-menerus; (2) masyarakat atau kelompok masyarakat akan banyak memiliki ruang untuk menyatakan permasalahan yang dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai masukan berharga; (3) proses berlangsungnya pengelolaan air minum berdasarkan kemampuan warga masyarakat itu sendiri, (4) warga masyarakat atau pelanggan air minum memiliki peran penting dalam setiap keputusan; dan (5) warga masyarakat atau pelanggan air minum akan lebih banyak mendapat manfaat dari hasil pelaksanaan program layanan air minum oleh pengurus.

Dalam penerapan partisipasinya masyarakat memperlihatkan adanya (1) keterlibatan mental dan emosional disamping keterlibatannya dalam bentuk secara fisik, sehingga yang muncul adalah partisipasi sukarela dan bukannya partisipasi yang dipaksakan (2) Ada dorongan untuk menyumbang atau mendukung (*to contribute*) dalam situasi tertentu dan bukan sekedar menyetujui (*to consent*) terhadap sesuatu (3) Adanya dorongan untuk ikut bertanggung jawab dalam suatu ide atau kegiatan, karena apa yang disumbangkan atas dasar sukarela.

Gambar 1 :

**MODEL PENERAPAN PARTISIPASI MASYARAT
DALAM PENGADAAN AIR MINUM
DI KECAMATAN SAYUNG**



Model partisipasi di atas menunjukkan bahwa energi partisipasi yang ada di masyarakat muncul dari hasil penguatan (*empowerment*) masyarakat yang dilakukan oleh pada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Masyarakat yang sudah mendapatkan penguatan kemudian berkreasi untuk berpartisipasi serta mensikapi berbagai persoalan sosial yang ada di desa, yang salah satunya adalah masalah air minum, yang selama ini menjadi beban sosial masyarakat desa. Prakarsa hanya tumbuh apabila terdapat emansipasi serta kesempatan yang penuh untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Disinilah pentingnya kebebasan dan kesempatan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut individu dan masyarakat. Dalam keadaan tiadanya kebebasan dan kesempatan, prakarsa dan daya kreasi menjadi terbatas. (Kartasasmita : 1998) Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk menerapkan partisipasinya dalam pengadaan air minum, oleh karena itu penerapan partisipasinya disalurkan melalui perwakilan dengan membentuk pengurus yang ditugasi untuk mempersiapkan pembangunan sarana air minum dan sekaligus pengelolaannya. Semua kebijakan pengurus pembangunan dan pengelolaan sarana air bersih berakar dari inisiasi dan pemikiran masyarakat yang tentunya sudah mengalami proses reduksi. Dengan kebijakan yang berakar dari partisipasi masyarakat maka setiap kebijakan yang diputuskan oleh pengurus dapat dijalankan dengan sempurna baik oleh pengurus maupun masyarakat. Model penerapan partisipasi yang demikian ini menekankan pada pengembangan potensi masyarakat itu sendiri, yaitu mengorganisasikan serta membangun sesuai dengan tujuan yang

mereka kehendaki. Intinya melalui partisipasi, bagaimana membantu anggota masyarakat desa untuk menolong dirinya sendiri dan memperbaiki kondisi hidupnya. Oleh Hagul (1985:141) pendekatan pembangunan yang berakar dari partisipasi masyarakat ini disebut dengan **“Pembangunan Masyarakat dari Dalam”** (*Development from within*)

SIMPULAN

Secara umum pengadaan dan pengelolaan air minum/bersih di Kecamatan Sayung tidak mengalami kendala yang berarti. Kendala yang ada selalu dapat diatasi oleh pengurus berbekal dukungan dan partisipasi aktif dari pelanggan (warga) yang merasa terbantu dengan adanya pengelolaan air minum yang murah dan cukup.

Tanggung jawab pemerintah Kecamatan Sayung dan Kabupaten Demak terhadap pemenuhan air minum/bersih bagi warga/masyarakat yang berada di perbatasan dengan pantai belum nampak. Padahal kebutuhan air minum/bersih merupakan kebutuhan pokok bagi warga/masyarakat untuk melangsungkan hidupnya.

Partisipasi masyarakat di Desa Bedono, Timbulsloko, Surodadi dan Sriwulan Kecamatan Sayung dalam pengadaan dan pengelolaan air minum sudah berjalan dengan baik karena dilatarbelakangi oleh kebutuhan bersama akan air minum sebagai kebutuhan pokok hidup dan didukung dengan kultur masyarakatnya yang religius dan kekerabatan yang masih kuat, disamping setiap kebijakan yang diambil oleh pengurus pengelola air minum berakar dari inisiatif/partisipasi masyarakat.

Meskipun pemenuhan kebutuhan air minum oleh masyarakat oleh sudah berjalan dengan baik, namun

masyarakat masih berharap ada sarana air minum yang disediakan oleh pemerintah untuk meringankan beban

masyarakat terhadap kebutuhan air minum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen PMD Depdagri, 1996. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa, Jilid I Pemahaman Dasar*. Jakarta: PT Penebar Swadaya.
- Ditjen PMD Depdagri, 1996. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa, Jilid I Pemahaman Dasar*. Jakarta: PT Penebar Swadaya.
- Faisal, Sanafiah, 1989. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Y3A.
- Fernandez, Johanes, 1992. "Mencari Bentuk Otonomi Daerah dan Upaya Memacu Pembangunan Regional di Masa Depan" dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 2 hal. 26-36. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hagul, Peter, 1985. *Pembangunan Desa dan LSM*. Jakarta: LP3ES.
- Kjellberg, Francesco, 1995. "The Chaling Values of Local Government" dalam *ANNALS, AAPSS*, 540, July 1995. American Academy. p.40-50.
- Korten, David dan Sjahrir, 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles dan Huberman, 1984. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Yin, Robert K. (1997) *Studi Kasus : (Desain dan Metode)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.